

**Judul** : DPR Dukung minyak goreng bersubsidi  
**Tanggal** : Senin, 10 Januari 2022  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 7

## DPR Dukung Minyak Goreng Bersubsidi

■ MUHAMMAD NURSYAMSI

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, persoalan mahalnya harga minyak goreng sebuah ironi karena Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia. DPR pun mendukung pemerintah untuk menyediakan minyak goreng bersubsidi.

Puan mencontohkan Malaysia, yang dapat memberikan subsidi minyak goreng untuk warganya. Malaysia menetapkan harga minyak goreng bersubsidi senilai RM 2,5 atau sekitar Rp 8.500 per liter untuk kemasan sederhana. Dia pun berharap, pemerintah bisa memberikan subsidi sebanyak-banyaknya untuk rakyat karena harus mampu menstabilkan harga pangan, sehingga beban rakyat akan terbantu.

"Negara harus bisa memastikan rakyat dapat menikmati hasil

bumi tanpa kesulitan," kata Puan dalam keterangannya, Ahad (9/1).

Dia menyoroti tingginya harga minyak goreng sehingga menyarankan agar pemerintah menyalurkan minyak goreng murah bersubsidi secara merata. Sebab, menurut Puan, hingga saat ini harga minyak goreng di pasaran masih sekitar Rp20 ribu per liter.

Selain itu, Puan mendukung langkah anak usaha *holding* perkebunan, PT Industri Nabati Lestari (INL), yang sedang mengembangkan produksi turunan minyak sawit. INL mengeluarkan merek minyak goreng ekonomis seharga Rp 14 ribu per liter sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan pemerintah. "Merek minyak goreng ini dapat menunjang kebijakan pemerintah, yang menargetkan 1,2 juta liter minyak goreng subsidi untuk menekan lonjakan harga," ujarnya.

Puan berpesan agar minyak

goreng kemasan ekonomis INL segera beredar di seluruh wilayah Indonesia. Dia juga meyakini merek tersebut tidak akan kalah dengan berbagai merek minyak goreng yang biasa ditemui di pasaran.

Selain mengendalikan harga minyak goreng, pemerintah juga diharapkan dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok lainnya yang masih tinggi.

"Beberapa kebutuhan pokok, seperti telur, bawang, dan cabai harganya belum stabil," katanya.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak, berharap pemerintah dapat mematok harga minyak goreng yang telah disubsidi sebesar Rp 11 ribu per liter. Hal tersebut disampaikan Amin, menyikapi rencana pemerintah menyediakan 1,2 miliar liter minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter di tingkat konsumen.

"Harga jual minyak goreng

setelah disubsidi seharusnya tetap mengacu pada Permendag No 7 Tahun 2020, yang mengatur harga minyak goreng Rp 12.500 per kilogram atau sekitar Rp11 ribu per liter," kata Amin, akhir pekan lalu.

Amin juga meminta pemerintah berkomitmen pada rencana awal, yang akan menerapkan subsidi dua juta ton minyak goreng atau sekitar 25 persen dari total konsumsi minyak goreng nasional delapan juta ton per tahun. Menurut Amin, dana subsidi untuk minyak goreng tidak akan membebankan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, dana subsidi yang diambil dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS), berasal dari pungutan ekspor produsen minyak sawit mentah (CPO) atau dikenal dengan *CPO supporting fund* (CSF).

■ antara ed: satriakartika.yudha